

**PERFILMAN INDONESIA
HARAPAN DAN KENYATAAN**

Oleh:
Dwi Aji Budiman, S. Kom, MA*

ABSTRACT

Previously, the New Order era, many filmmakers complain of the absence of freedom. So they do not make a movie that contains criticism and protest, especially to the government. Now times have changed. Why do not they make movies critical.

Film Indonesia currently exploit as taboo in the social and cultural issues, some social and cultural issues like just lying, do not question the filmmakers those problems.

Society was considered problematic and the film only touches the edge themes. Film Indonesia is also a little offensive themes that comment on social life (social commentary) and cultural life (cultural commentary). Yet social and cultural life, as portrayed in the film well, will be able to provide an important contribution to our lives as a nation.

Whereas many social phenomena that have lived followed by a good research will be able to produce a representation of the critical themes and interesting.

This is an internal failure of the filmmakers themselves. But there was no denying that there are barriers that are external to the emergence of themes that do not represent a critical public life. Barriers were named business interests.

Keyword: Indonesian film and social representation

* Dosen Komunikasi Massa Univ. Negeri Bengkulu

Pengantar

Meski tumbuh, film Indonesia hingga kini belum berhasil membangun arah dan fondasi industri yang stabil. Barangkali ini gejala umum dalam sebuah negeri dengan rancang kebudayaan dan rancang ekonomi yang berantakan. Berbeda dengan kelahiran sastra dan seni rupa modern Indonesia yang terkait dengan pergumulan ide-ide yang diyakini sebagai pendasaran baru terhadap arah perubahan sosial budaya menuju suatu visi, kelahiran film Indonesia relatif tak bersentuhan dengan pergumulan semacam itu.

Sastra dan Seni Rupa Indonesia, dalam keterlibatannya dengan kebudayaan menemukan momentumnya pada sisi-sisi estetikanya, sementara film dibuat seolah berada di luar hiruk pikuk pemikiran kebudayaan serta dibuat semata-mata sebagai hiburan, kelengkapan dan pelipur lara.

Gambar hidup di Batavia memang sudah ada sejak 5 Desember 1905, tapi waktu itu sebagai barang impor. Film pertama yang dibuat di Hindia Belanda pada 1927 pun bukan karya orang Indonesia, melainkan dua orang kulit putih, F Carli dan Kruger, di

Bandung. Baru tahun 1950 disepakati sebagai tanda lahirnya film nasional melalui karya Usmar Ismail, Darah dan Doa.

Waktu pengambilan gambar pertama film tersebut, 30 Maret, kini diperingati sebagai hari film. Tentu ada Usmar Ismail, Asrul Sani, D Djajakusuma, dan Sjumandjaja yang menjadikan film sebagai media yang relevan mengidentifikasi berbagai problem kebudayaan. Khusus Asrul Sani, ia sekaligus sastrawan dan pemikir yang terlibat secara intensif dengan arus pemikiran seni, budaya, dan politik pada masanya. Namun, selebihnya, sebagian besar orang film di Indonesia adalah para pembuat hiburan semata.

Fakta bahwa film adalah sekedar benda hiburan semata ditunjukkan bahwa film adalah sebuah produk industri. Karena itu, melihat situasi obyektif perfilman kita sekarang ini, perlu kiranya mengidentifikasi berbagai problem mendasar. Problematika mendasar itu dapat dicatat ketika dunia seni ternyata dapat menembus berbagai peristiwa besar di tingkat internasional tanpa campur tangan negara sama sekali. Disisi lain, kendatipun beberapa film Indonesia telah menembus festival-festival

Internasional namun catatan-catatan penting masih perlu diperhatikan, terlebih lagi penciptaan karya perfilman Indonesia yang sebaiknya merumuskan paradigma kreativitas serta orisinalitasan. Hal lain yang hingga kini masih cocok dipersoalkan adalah, kritik atas miskinnya tema film ketika dikaitkan dengan bahan sosial yang melimpah seperti konflik antar kelompok, kepedihan tiada henti akibat bencana, gejala desintegrasi, pelanggaran HAM, kelaparan, masalah TKW dan sebagainya, kritik ini biasanya diiringi pula kecaman terhadap buruknya skenario dan minimnya akal sehat dalam menyusun cerita.

Tema Dan Industri Bisnis Film Indonesia

Dahulu, pada masa Orde Baru, banyak pembuat film mengeluh akan ketiadaan kebebasan. Sehingga mereka tak membuat film yang memuat kritik dan protes, terutama kepada pemerintah. Sekarang jaman sudah berubah. Mengapa mereka tak membuat film-film yang kritis. Perfilman Indonesia saat ini seakan tabu dalam mengeksploitasikan persoalan sosial dan budaya, beberapa masalah sosial dan budaya seakan tergeletak begitu

saja, pekerja film tak mempersoalkan masalah-masalah itu.

Masyarakat dianggap tak bermasalah dan film hanya menyentuh tema-tema pinggiran. Film Indonesia juga sedikit yang menyinggung tema-tema yang mengomentari kehidupan sosial (social commentary) dan kehidupan budaya (cultural commentary). Padahal kehidupan sosial dan kehidupan budaya, ketika dipotret dengan baik dalam film, akan mampu untuk memberi sumbangan penting bagi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa.

Dalam pertimbangannya, Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI) pernah menyatakan bahwa penilaian tema adalah melihat wajah Indonesia dalam film Indonesia. Karena kenyatannya, banyak film Indonesia, yang berwajah Hongkong, Taiwan, India, atau campuran bermacam-macam wajah. Rosihan Anwar yang kala itu menjadi dewan juri FFI, menyatakan, kecuali sebagian kecil, film Indonesia sama sekali tidak memperlihatkan keterlibatan sosial. Beberapa film mencoba berbicara tentang masalah sosial, tapi lantaran kurangnya persiapan dan pengenalan lingkungan, maka masalah sosial yang

ditampilkan terasa sangat dibuat-buat dan semu. Yang ingin kita lihat dalam film kita adalah gambaran dari manusia dan kehidupan Indonesia yang ada. Keinginan untuk menggambarkan ini ada pada beberapa film yang turut festival, tapi karena penggambaran tokoh maupun lingkungannya tidak utuh, maka gambaran itu menjadi tidak meyakinkan.⁶

Industri Bisnis Perfilman Indonesia, Sebuah Kegagalan

Kembali mengulang pernyataan Rosihan Anwar, beberapa film mencoba berbicara tentang masalah sosial, tapi lantaran kurangnya persiapan dan pengenalan lingkungan, maka masalah sosial yang ditampilkan terasa sangat dibuat-buat dan semu. Masalah kegagalan merepresentasikan kondisi sosial masyarakat dalam film Indonesia bermula dari kegagalan pembuat film untuk memahami masyarakatnya sendiri. Kegagalan ini berangkat dari kurangnya pengetahuan tentang kehidupan masyarakat. Banyak pembuat film yang terlalu sering menonton film dan kurang membaca

⁶ Rosihan Anwar, Kompas 3 maret 1977, kumpulan tulisan JB Kristanto, Kompas

buku mengenai kehidupan sosial, budaya dan politik masya-rakat. Berbagai fenomena yang tampak di sekitar pembuat film sebenarnya merupakan material yang sangat kaya untuk dieksplorasi menjadi cerita-cerita yang menarik.

Tampaknya para pembuat film tidak memiliki dorongan hasrat (passion) untuk mengeksplorasi masalah sosial dan budaya menjadi cerita menarik, mereka membiarkannya lewat dan memilih sesuatu yang aman-aman saja. Padahal berbagai fenomena sosial yang ada tinggal diikuti dengan riset yang baik akan mampu menghasilkan sebuah tema representasi yang kritis dan menarik. Hal ini merupakan kegagalan internal dari para pembuat film sendiri. Namun tak bisa dipungkiri bahwa ada hambatan yang bersifat eksternal terhadap munculnya tema-tema yang tidak merepresentasikan kehidupan masyarakat secara kritis. Hambatan itu bernama kepentingan bisnis.

Tak bisa dipungkiri bahwa sebuah film merupakan sebuah kegiatan ekonomi dengan biaya semurah mungkin dan diharapkan untuk kembali dalam waktu yang singkat, ini adalah prinsip ekonomi serta tetap menjadi dasar usaha

mereka.⁷ Dengan kesadaran bahwa film adalah kegiatan bisnis, maka para pembuat film (terutama produser) ingin mengembalikan uang mereka secepatnya dengan keuntungan sebesar-besarnya. Karena film adalah sebuah bisnis, maka hal ini tidak menjadi masalah jika mereka mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, sepanjang mereka melakukannya tanpa semata-mata mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksud salah satunya adalah peniruan.

Ketika Petualangan Sherina berhasil mendatangkan keuntungan kotor hingga 10 milyar rupiah kepada produsernya, maka bermunculanlah film-film seperti Petualangan Seratus Jam, Joshua oh Joshua hingga Tina Toon dan Lenong Bocah yang mencoba peruntungan serupa dengan film anak-anak. Demikian pula ketika Ada Apa Dengan Cinta? berhasil meraih 2,6 juta penonton, maka bermunculan film-film remaja sejenis dengan harapan sama beruntungnya dan tak ada yang berhasil kecuali

⁷ Tabloid Prisma No 11, 1986, kumpulan tulisan JB. Kristanto, Kompas

Eiffel I'm in Love yang beruntung meraih 3 juta penonton dan menjadi film nasional dengan penonton di bioskop terbanyak sepanjang masa hingga saat ini. Juga ketika Jelangkung bermodalkan kurang dari 500 juta rupiah menghasilkan keuntungan kotor hingga 11 milyar rupiah, orang berpikir bahwa akan mudah mendapat hal serupa dari film horor. Ternyata tak semudah itu. Film-film sukses di atas juga tak mencatat adanya pandangan kritis terhadap keadaan sosial masyarakat. Mereka masih bergulat dengan tema-tema pinggiran yang hanya berputar pada persoalan cinta dan horor.⁸

Film Indonesia Kehilangan Jati Diri

Dunia perfilman nasional memang telah bangun dari tidur, ini ditandai dengan munculnya optimisme insan muda film dalam berkarya. Begitulah kira-kira kesan yang dilontarkan oleh sejumlah media cetak dan elektronik nasional menanggapi menjamurnya film-film nasional beberapa waktu ini. Oleh sebab itu, tak salah bila masyarakat

Indonesia menaruh banyak harapan dengan meledaknya dunia perfilman nasional. Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana seusai menyaksikan tayangan film-film nasional. Pada dasarnya, keindahan format penyajian yang sarat kreativitas dan inovasi dalam segi teknis adalah faktor yang dielukan oleh film-film baru Indonesia saat ini. Tetapi sayangnya, dari segi tematis dan isi film ternyata masih sangat jauh. Sebagian penikmat film nasional yang menyaksikan wajah baru film Indonesia seakan-akan menyadari bahwa film Indonesia telah kehilangan jati diri yang sesungguhnya.⁹

Banyak film nasional yang ada saat ini kurang mendidik dan sangat vulgar dalam penyampaian pesannya. Di sini, apakah insan film telah melupakan sisi bahwa film adalah media komunikasi paedagogi (pendidikan) bagi masyarakat atau tidak?

Padahal menurut teori klasik media massa bahwa masyarakat adalah golongan yang rentan akan pengaruh informasi, sehingga mudah diprovokasi dan diagitasi lewat propaganda media massa

⁸ Eric Sasono Tulisan ini pernah dimuat di Majalah F, edisi 1, Juli 2005

⁹ Sinar Harapan/hiburan/budaya

termasuk film.¹⁰

Perhatikan beberapa adegan-adegan kontroversi dalam film nasional seperti Film Ada Apa Dengan Cinta?, adegan mencium mesra lawan mainnya. Di dalam hal kevulgaran ini, banyak insan film menangkis dan berkelit bahwa memang adegan tersebut yang terjadi di masyarakat dan itulah kebenaran dan keindahan yang memang perlu masyarakat ketahui. Yang kita nantikan saat ini adalah film dengan jati diri Indonesia yang mengangkat citra dan tradisi asli Indonesia. Misalnya adegan ketika Benyamin S (alm.) mengatakan "haram hukumnya wanita berduaan dengan pria", dalam Si Doel Anak Betawi.

Regulasi Perfilman Indonesia (Dari UU Hingga LSF Indonesia)

Kegelisahan akan tema-tema film Indonesia saat ini memang sangat beralasan, kegelisahan itu tergambar dari beberapa adegan-adegan kontroversi dan vulgar dalam film-film nasional. Di dalam hal kevulgaran ini, banyak insan film menangkis dan berkelit bahwa memang adegan tersebut yang

terjadi saat ini di masyarakat dan itulah kebenaran dan keindahan yang memang perlu masyarakat ketahui. Tetapi apakah hal tersebut ditanggapi sama oleh para remaja yang tergolong ABG usai menyaksikan adegan-adegan tersebut? Di benak mereka terjadi proses kognitif legitimasi pengesahan sikap bahwa mereka bisa dan "harus" berkelakuan seperti adegan film-film tersebut. Apalagi diakui peluncuran film tersebut disamakan dengan momen hari kasih sayangnya remaja, yakni Valentine. Karenanya, dilihat dari kasus tersebut betapa pentingnya sebuah perundang-undang perfilman.

Pada dasarnya, peraturan tentang perfilman telah ada sejak pemerintahan orde lama dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada Penetapan Presiden No 1 tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman yang dengan jelas disebutkan bahwa mengingat pentingnya fungsi film dalam usaha mencapai tujuan revolusi.¹¹

¹⁰ Nurudin Komunkasi Massa, Cespur, Yogyakarta

¹¹ <http://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com/tag/artikel/>

Regulasi Perfilman Indonesia

Ada yang harus dicatat pada tahun 1992, ketika Harmoko menjadi Menteri Penerangan yaitu film mampu menembus DPR/ MPR dan hasilnya masuklah film dalam GBHN. TAP MPR menegaskan bahwa film bukan semata-mata barang dagangan tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya dan ilmu. Undang Undang No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman juga memayungi Lembaga Sensor Film yakni Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1994 yang dimaksudkan untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman nasional dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/ atau penayangan film serta reklame film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman. Dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, dengan jelas disebutkan yang dimaksud dengan Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/ atau ditayangkan kepada umum baik secara utuh maupun setelah

penyiapan bagian gambar atau suara tertentu. Penyensoran dilakukan dengan meneliti segi-segi : Keagamaan, Ideologi, Politik, Sosial Budaya dan Ketertiban Umum. LSF berusaha menjembatani antara insan film – hasil karya insan film dan pemirsa, sehingga tayangan layak tonton, sungguh hal ini tidak bermaksud menyusahkan.

Para insan film diajak untuk menghormati sebuah penyensoran. Apalagi mengingat kebhinekaan Indonesia, baik budaya, sosial dan lain-lainnya. Dalam menyensor selain kriteria yang baku juga menggunakan akhlak, akal, ilmu dan rasa. Pada tahun 1981 untuk pertama kali diadakan seminar Kode Etik Produksi Film Indonesia di Jakarta oleh insan perfilman. Dari seminar itu mengental ide tentang pentingnya Kode Etik Film, agar dapat meminimalkan dampak tontonan yang ranum dengan sex. Dengan kode etik diharapkan para insan film sejak awal produksi sudah menerapkan kode etik dan mampu menyaring sendiri, sehingga adegan yang tidak Indonesiawi tak perlu digunting oleh Badan Sensor Film karena sudah ditiadakan oleh sutradara dan produser, dengan demikian kreatifitas yang

dianut oleh insan kreatif tak akan dipasung.

Seminar menghasilkan pemikiran yang menjadi jiwa insan perfilman, yaitu:

1. Film Indonesia seharusnya memiliki tema sentral mengenai situasi dan kondisi manusia Indonesia yang menjadi sifat dan ciri khas kepribadian dalam lingkungan yang wajar.
2. Film merupakan hiburan yang membuat luhur pikiran, mental, rohani dan cita-cita
3. Film sebagai produksi kebudayaan dapat mendorong masyarakat untuk memelihara dan memupuk kebudayaan yang dimilikinya sebagai proses humanisasi..
4. Larangan terhadap penyajian adegan-adegan yang berefek pada penurunan nilai-nilai moral penonton.
5. Dalam penampilan kontradiksi dramatik antara kebaikan dan kejahatan perimbangan jumlah adegan minimal harus sama.
6. Kode Etik yang dihasilkan juga dimaksudkan untuk menjaga susila manusia Indonesia. Tercermin aturan mana yang boleh dan mana yang harus dihindari karena bisa menyinggung tata susila dan budaya Indonesia.
7. Kesucian lembaga pernikahan dan rumah tangga harus dijunjung tinggi.
8. Tidak membenarkan dan menganggap wajar hubungan seks liar/ bebas di luar pernikahan yang sah.
9. Dikecualikan apabila adegan perzinahan (hubungan seks di luar hukum) sangat diperlukan untuk membangun konstruksi dramatik. Namun adegan ini tidak boleh disajikan dengan terang-terangan namun harus diungkapkan secara artistik dan teknik dalam bentuk metafora.

10. Dilarang dengan terang-terangan menyajikan nafsu birahi (ciuman merangsang dengan mulut terbuka, pelukan penuh hawa nafsu, sikap dan perbuatan yang menimbulkan rangsangan seks yang rendah).
11. Dilarang menampilkan adegan rayuan untuk melakukan hubungan seks/ perkosaan secara terinci, kecuali jika terpaksa demi konstruksi dramatik namun harus berfungsi bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan akibat buruk (bagi yang menirunya).
12. Dilarang adegan tarian/ gerak-gerik/ isyarat tubuh yang menggugah asosiasi penonton pada kegiatan seksual yang menimbulkan kesan kecabulan.
13. Dilarang menyajikan adegan dengan pakaian terlalu minim yang dapat merangsang nafsu birahi.
14. Dilarang menyajikan adegan telanjang bulat, sungguhpun dalam bentuk samar-samar, bahkan dalam bentuk imajinasi yang ditampilkan melalui reaksi yang tidak senonoh para pelakunya.
15. Dilarang menampilkan adegan penelanjangan yang tidak perlu dan tidak senonoh termasuk kehidupan nyata dari orang pribumi suatu negara asing (kecuali untuk film pendidikan dan dokumenter, dengan syarat tidak menimbulkan kesan memuakkan).
16. Dilarang menampilkan cara dan teknik pelacuran serta perbudakan wanita (kecuali dalam konteks kutukan dan harus ditampilkan dengan metode simbolis).
17. Dilarang menampilkan aborsi sebagai tema cerita (kecuali dalam konteks pencegahan, kutukan dan ditampilkan dengan metode simbolik). Tidak boleh disajikan sebagai bahan komedi.

18. Dilarang menampilkan adegan-adegan : seksual dalam kamar tidur; hukuman mati; operasi pembedahan serta kelahiran bayi; cara penyuntikan atau penggunaan narkoba (apabila terpaksa demi tuntutan cerita harus dengan penuh pertimbangan dan hati-hati).
19. Dilarang menjadikan kesehatan seks dan penyakit kelamin sebagai tema sentral sebuah cerita film (kecuali untuk tujuan edukatif).
20. Dilarang menampilkan alat seks atau kelamin, ketelanjangan dalam wujud nyata atau dalam bentuk imajinasi. Bentuk tubuh dilarang ditampilkan secara berlebihan dan tidak senonoh (kecuali untuk bayi dan anak-anak di bawah umur).
21. Kelainan seks (hubungan seks tidak wajar/ murtad) hanya boleh ditampilkan secara terselubung. Kehidupan seks hewan dilarang, kecuali untuk tujuan edukasi.

Karena Kode Etik disusun sendiri oleh para praktisi dan seniman film tentu saja diharapkan ditaati dan bila di langgar, akibatnya akan menimbulkan beban moral. Apabila Kode Etik Produksi Film Indonesia dilaksanakan dengan jujur, benar dan nalar, maka jaminan klasifikasi film Indonesia akan terjadi secara wajar dan alamiah, tidak perlu diatur-atur lagi. Tetapi kenyataannya toh masih ada yang tak menaati kode etiknya sendiri, bahkan merasakan bahwa regulasi akan mengekang kreatifitas, sebab film sudah memasuki area bisnis yang menjanjikan dan harus berani bersaing dan meniru apa yang digemari meskipun berlawanan dengan Kode Etik yang dibuat sendiri. LSF bekerja berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, yang antara lain mencantumkan Pedoman Penyensoran dan Kriteria Penyensoran.

Dari sumber LSF diketahui bahwa selama tahun 2006 LSF telah menggunting adegan film sepanjang 847,9 m karena menampilkan adegan

porno. Penampilan sadis yang dipotong ada 116,1 m dan karena sebab lain-lain (pelecehan, penghinaan, dll) terpaksa digunting 84 m. Untuk rekaman video telah dihapus 96.094 detik karena pornografi, 14.971 detik menampilkan sadis/kekerasan dan 3103 detik karena alasan lain yang kurang pantas ditayangkan.

Para insan film diharapkan melakukan swa sensor sebagaimana masyarakat juga menumbuhkan swa sensor atau daya saring, sebab apabila para pihak sudah mempunyai daya saring, tentu tak perlu lagi ada Lembaga Sensor Film, sebagaimana yang dimimpikan oleh sineas muda yang merasa kreatifitasnya terbelenggu. Semuanya menginginkan film Indonesia yang berbudaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri .

Produktivitas Film Indonesia Dan Selera Masyarakat

Mari kita bandingkan „selera“ penonton film pada tahun 1996, dengan produksi 33 film. Coba simak judulnya: Ranjang Cinta, Mistik Erotik, Cinta dan Nafsu, Gairah Malam Yang Ketiga, Lampiasan Nafsu, Extasi dan Pengaruh Sex, Gejolak Nafsu dll.

Lebih 50% beraroma sex. Tahun 1997 juga diproduksi 32 film nasional, dengan judul yang syur seperti Permainan Yang Panas, Gairah Tabu, Kebebasan Sex, Gigolo, Gairah 100% dll. Lebih 50% kental nuansa beraroma sex. Tahun 1998 produksi menurun, Cuma 14 film. Masih ada film dengan „bau“ sex seperti Sentuhan Tabu, Skandal Erotis, Gejolak Sexual ,tetapi mulai muncul film bernuansa seni seperti Daun Di atas Bantal karya Garin Nugroho dan Kuldesak.

Di tahun 1999, produksi melorot tajam, cuma 7 film. Simaklah judulnya yang seram : Nafsu Membara, Permainan Membara, Menentang Nafsu. Tahun 2000 lebih lesu lagi karena Cuma 6 produksi. Judul dan cerita lebih srstistik, seperti Puisi Tak Terkubur-kan, Petualangan Sherina yang meledak dipasaran dan sampai sekarang tak tertandingi untuk film anak-anak, Joshua Oh Joshua, Janan Ada Dusta, Reinkarnasi, Kisah Veronika.

Demikian pula tahun 2001 dengan 6 film dan tak lagi terpaku dengan judul menyerempet sex tapi sudah memilih judul yang „Jain“ dari lain“ seperti Demokras; Jangan Main Hakim Sendiri; Pasir Berbisik; Telegram; Marsinah dan Jelang-

kung. Rupanya penonton sudah muak dengan pornografi dan ingin sesuatu yang sesuai dengan budaya.. Tahun 2002 cuma 10 film, tahun 2003 menurun cuma 11 film. Baru pada tahun 2004 meningkat dengan 22 film dan tahun 2005 mencapai 32 film dan dipuncaki tahun 2006 dengan 33 film.¹²

Salah satu produk tahun 2006 adalah film *Eskul* yang ramai dan diprotes karena dianggap musiknya plagiat dari musik film luar negeri dan hal ini menyebabkan sebagian mengemba-likan piala Citra sebagai tanda protes sineas muda.

Naik turun jumlah produksi film rupanya menjadi indikasi - entah itu karena situasi yang tidak kondusif maupun kondisi ekonomi dan perubahan selera masyarakat. Untuk tahun 2007 sampai dengan pertengahan Maret, ada 7 film. Ini pertanda yang bagus dan ada kemajuan walau merambat tapi pasti. Naik turun jumlah produksi film rupanya menjadi indikasi - entah itu karena situasi yang tidak kondusif maupun kondisi ekonomi dan perubahan selera masyarakat. Untuk

tahun 2007 sampai dengan pertengahan Maret, ada 7 film. Ini pertanda yang bagus dan ada kemajuan walau merambat tapi pasti.

Film Lokal di Tengah Banjir Film Impor

Kalau melihat perjalanannya di masa lalu, industri film Indonesia pernah melewati masa-masa yang cukup baik. Produksinya bahkan pernah mencapai lebih dari seratus judul. Tentu banyak faktor kenapa keberhasilan itu bisa terjadi. Keberhasilan itu tidak terlepas dari ketegasan sikap pemerintah dan keberanian menteri penerangan sebagai pembina perfilman nasional dalam membela kepentingan perfilman Indonesia dalam menghadapi persaingan, yaitu mengatur film impor yang membanjiri Indonesia.

Kebijakan yang diambil antara lain membatasi judul film impor dan jumlah copynya dengan sistem kuota. Lalu, memanfaatkan film impor untuk membantu pertumbuhan produksi film Indonesia dengan mewajibkan importir film untuk memproduksi film Indonesia dengan sistem "wajib produksi" dengan rasio 5:1 dan 3:1.

Selain itu, importir film juga

¹² Diambil dari Data Lembaga Sensor Film

diwajibkan menyetor dana pada saat mengimpor satu judul film dengan sistem "wajib setor". Pemerintah mencegah persaingan tidak sehat antara film Indonesia dengan film impor dengan mem-berikan bantuan kepada produksi film Indonesia dananya diambil dari setoran para importir film.

Dengan kata lain menyeim-bangkan modal produksi film Indonesia (disubsidi) dengan modal importir film asing yang dibebani wajib setor dan pungutan impor. Sayang, kebijakan yang baik itu kurang dikontrol oleh aparat pemer-intah dalam memberikan subsidi.

Belum lagi adanya ketidak-mampuan sebagian produser film yang disubsidi sehingga tujuan dari kebijakan tersebut kurang efektif dan dipersoalkan orang di kemudian hari, dan bukannya disempurnakan.¹³

Untuk melihat perbandingan antara produk Indonesia dan asing dapat mencermati grafik yang sum-bernya dari LSF seperti tabel disamping.

KET	Film		Video	
	Indo	Impor	Indo	Impor
2002	10	269	7.347	5.1491
2003	11	227	6.275	6.362
2004	22	201	7.149	8.820
2005	32	202	1.295	10.293
2006	33	167	7.618	14.78

Sebuah Kebijakan Pembangunan Film Nasional

Membuat industri film Indo-nesia menjadi suatu usaha yang menguntungkan adalah dengan mengurangi beban dan pungutan yang dapat mengurangi pendapatan, misalnya, tarif pajak tontonan diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen, atau bila perlu dihapuskan.

Langkah penting lainnya adalah meningkatkan jumlah penonton film Indonesia dengan jalan menciptakan persaingan yang sehat dan wajar antara film Indonesia dan film impor, tontonan di bioskop dengan tontonan yang ditayangkan secara gratis di stasiun televisi serta film bioskop dan rekaman video (vcd dan dvd bajakan).

Lalu, menurunkan biaya pro-duksi film Indonesia dan mening-katkan kualitasnya dengan cara bea

¹³ Rudy S Sunyoto SE, Ketua Komisi B (Peredaran Film) Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N).

masuk dan pungutan impor untuk bahan baku dan peralatan produksi film Indonesia dikurangi. Hal penting lain adalah perlunya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia film Indonesia yang dibantu oleh pemerintah.

Pemerintah juga perlu memberi bantuan untuk meringankan beban produser film antara lain dengan memberikan subsidi dalam bentuk bantuan untuk pencetakan tambahan kopi film sehingga filmnya dapat beredar dengan lebih cepat dan secara serentak di berbagai kota di Indonesia.

Dengan demikian, potensi untuk meraup pendapat secara maksimal dapat dicapai, minat menonton naik, gairah investasi gedung bioskop di daerah muncul. Pada gilirannya, pemerintah daerah menerima pendapatan daerah dari pajak tontonan.¹⁴

Kesimpulan

Menghadapi dinamika perkembangan film yang semakin mengglobal saat ini perlu adanya

perangkat peraturan yang dapat mengakomodir perkembangan perfilman menuju terbentuknya industri perfilman yang mapan dengan sisi seni-pengetahuan-teknologi yang juga mendukungnya.

Perlu kiranya untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki (sumber daya alam, sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, kesenian, dan tradisi) untuk menghadapi tantangan perubahan dunia sekitarnya sehingga mampu bertahan dan bersaing, hingga akhirnya dapat mendekati kualitas perfilman yang diinginkan.

Untuk mencapai hal ini dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang paling terkait, yaitu masyarakat film sendiri, dan pemerintah sebagai rekanan.

Peran yang dituntut adalah tanggungjawab pemerintah untuk menjadi fasilitator yang menjamin bahwa iklim yang memayungi aktivitas perfilman dapat berjalan dengan dinamis dan sehat, sehingga film mampu berperan sebagai kendaraan bagi agenda kebudayaan bangsa ini, sekaligus aset ekonomi yang signifikan bagi tercapainya kesejahteraan bangsa.

Masyarakat pelaku industri perfilman juga turut aktif mengatur

¹⁴ Rudi Sanyoto Sekjen Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI) dalam wawancara Suara Pembaharuan

dirinya sendiri dalam hubungan antar pelaku industri, serta perannya masing-masing dalam masyarakat demi pengembangan perfilman.